BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan zakat telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sangat penting untuk mencantumkan penelitian terdahulu agar dapat membedakan substansi dari penelitian ini. Apakah penelitian ini menjadi *anti thesis* dari penelitian sebelumnya atau mungkin *sinthesa*. Yang pasti penelitian terdahulu perlu untuk disajikan karena disinilah letak perputaran ilmu pengetahuan. Adapun yang telah meneliti yaitu:

1. ***Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (eL-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) Penulis: Mustaen, Tahun: 2010, Fakultas: Syariah, Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, penelitian ini lebih fokus pada,*** sistem pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dan implementasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dan tinjauan UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang bertujuan mengetahui sistem pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki

Malang dan implementasinya dalam tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2. ***Model Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahiq (Studi di LAZIS Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kodya Malang).*** **Penulis:**

Ali Imron, Tahun: 2009 Fakultas: Syariah Jurusan: Ahwal Syakhshiyah, pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh LAZIS Masjid Sabilillah Kodya Malang dapat dikatakan sebagai zakat produktif yang pada sistem pendistribusiannya dilakukan secara bergulir kepada para mustahiq dengan bentuk akad pinjaman yang dikemas dengan dua model yaitu: pertama ditujukan untuk permodalan usaha sebagai tambahan modal usaha dalam membuka lapangan usaha dalam hal ini adalah (program UMKM), dan yang kedua permodalan kerja yang disalurkan dalam wujud barang sebagai alat kerja yang dijadikan sebagai sarana untuk bekerja dalam hal ini adalah (program pemberdayaan tukang becak).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih kepada masalah indikasi potensi disfungsi lembaga amal zakat yang mencakup salah satunya, masalah implikasi potensi disfungsi kelembagaan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kota Malang yaitu berupa perubahan peran yang tidak bisa mandiri, mengelola zakat secara langsung sebagaimana selama ini yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah yang sudah berjalan di Kota Malang. Penelitian ini lebih fokus pada indikasi potensi disfungsi kelembagaan, pengelolaan zakat yang berdasar pada Undang-undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011, serta tempat

penelitiannya berada di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang, sedangkan untuk penelitian terdahulu pertama, lebih fokus pada pengelolaan zakat dan implementasinya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta tempat penelitiannya di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-Zawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian terdahulu yang Kedua, fokus pada model pendayagunaan zakat untuk memberikan kesejahteraan kepada para mustahik, atau zakat produktif dengan program-program unggulan dalam pendistribusian zakatnya, serta tempat penelitiannya berada di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Dari beberapa perbedaan di atas, maka penulis menganggap cukup untuk membuktikan orisinalitas skripsi ini, karena memang apa yang penulis teliti dengan yang sudah teliti jelas berbeda tempat dan fokus dari penelitiannya.

B. Konsep Dasar Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan disebutkan sebanyak 82 ayat atau tempat dalam al-Qur'an.¹⁵ Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thaharah, namaa* dan *barakah*,¹⁶ atau *amal shaleh*.¹⁶ Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) yang menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat

¹⁵Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 13

¹⁶Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocemp, 2008), 1

adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji dan semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan hadits.¹⁷

- a. *Thaharah* artinya bersih-membersihkan atau mensucikan. Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. At-Taubat: 103).

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.¹⁸

- b. *Namaa* artinya tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an Surat (al-Baqarah: 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (Q.S. Al-Baqarah: 276).¹⁹

Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, diterjemahkan oleh Didin Hafidudin, dkk (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), 34

¹⁸ Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996), 198

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 276.

sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.²⁰

- c. *Al-Barakah* artinya balasan atau karunia Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingannya.

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: "Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya". (Q.S. Saba': 39)

Sedangkan menurut terminologi syariat zakat adalah bagian dari harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula²¹. Adapun menurut ahli fikih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SAW kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²²

Untuk lebih jelasnya akan di ungkapkan beberapa definisi zakat menurut imam *mazhab arba 'ah*:

²⁰ Al-Qur'an Terjemah, (Surabaya, Karya Ilmu, 1996), 70

²¹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 3

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, 35

- a. Imam Malikiyah: zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah: zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu oleh *syari'* untuk mengharap ridho Allah SWT.
- c. Syafi'iyah: zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanbilah: zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu pada waktu tertentu.²³

Dari pemaparan di atas terdapat perbedaan rumusan dan pengertian zakat yang dikembangkan oleh para ulama, walaupun dapat difahami esensi dari kesemuanya adalah sama, dimana zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* dengan syarat-syarat tertentu, yaitu *haul* dan *nisabnya*.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam *syari'at* Islam.²⁴ Inilah kemudian yang menyebabkan zakat diwajibkan dan bersifat mengikat, serta bukan anjuran semata. Kewajiban tersebut berlaku untuk semua *mukallaf* yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Keawajiban berzakat dapat dilihat dalam al-Quran dan hadits dengan dilengkapi keterangannya berdasarkan ijma' ulama

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, jilid III, (Damaskus: Daarul Fikri, 2006), 1788-1789

²⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Edisi II cet. VII (Malang, 1994), 225

a. Kewajiban berzakat dalam al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Di antaranya adalah:

1) Al-Baqarah: 43

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (Q.S Al-Baqarah: 43)

2) Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ رَوْحًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
﴿١٤١﴾

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S Al-An'am:141)

3) At-Taubah: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.(Q.S At-Taubat:11)

b. Kewajiban berzakat dalam al-Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

Artinya: “Dari Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakt, melaksanakan haji dan berpuasa bulan Ramadhan.”(HR Ahmad, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasai dan Ibn Hibban).²⁵

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا دَا أَمْرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (رواه الترمذي)

Artinya: “Saya mendengar abu umamah berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW berkhotbah di haji wada’ beliau bersbda; taqwalah kalian kepada Allah SWT shalatlah lima waktu, puaslah pada bulan ramadhan, tunaikanlah zakatmu, dan taatilah pemimpinmu, engkau akan masuk surga Tuhanmu.”(H.R. Tirmidzi).²⁶

c. Ijma’ ulama

Para ulama baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari

²⁵ Syaikh Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Hadits Arbain An Nawawiyah*, Jilid 1 (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 675

²⁶ Syaikh Abu Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri *Tuhfatul Ahwadzi Syarah Jami At Tirmidzi* [jilid 1] (Jakata, Pustaka Azzam, 2007), 195

kewajibannya.²⁷ Dengan demikian, merujuk pada al-Qur'an dan hadits serta ijma' ulama maka sudah jelaslah kewajiban zakat yaitu *fardlu ain*.

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya, zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat *nasf* atau lazim disebut zakat fitri dan zakat *maal* (harta).

a. Zakat Fitrah

Membayar zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik mereka yang sudah dewasa maupun bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Karena itulah disebut zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah bisa berupa bahan pangan atau makan pokok sesuai daerah yang ditempati. Bisa juga berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran atau harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

Kewajiban zakat fitrah merujuk pada firman Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, diantaranya: al-Qur'an surat al-A'laa: 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.”(Q.S. Al-A'laa: 14-15)

Kemudian dari hadits Rasulullah SAW yang terdapat dari beberapa riwayat:

حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر

²⁷Fakhruddin, *Fiqh Dan Menejemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008), 23

والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

Artinya: “*Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk shalat ied.*” (Bukhari dan Muslim).²⁸

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر قال فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إلا من البر فإنه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر

Artinya: “*Kami mengeluarkan zakt fitrah berupa makanan pada zaman Rasulullah SAW pada hari idul fitri, abu sa’id mengtakan lagi: dan makanan kami saat itu adalah gandum kismis, susu kering, dan kurma.*” (HR. Bukhari)²⁹

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal atau harta adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat³⁰. Dimana syarat-syaratnya adalah harta sudah menjadi milik sepenuhnya, harta berkembang, cukup nisab lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah mencapai haulnya.

Dalam buku pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan dipaparkan bahwa Zakat maal juga bisa diklasifikasi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

²⁸ Mohammad Ibnu Ismail Al-Bukhari al-ja’fi, *Sahih Bukhari*, Juz II, (Dar Ibnu Katsir, Beirut, 1993) 574

²⁹ Muhammad Abdur Rohman Ibnu Abdi Rohim Al-Mubari Kafuuri, *Syarh Hadist Tukhfatul akhwazdi*, (Daarul Kutub, Beirut, t.t) 673

³⁰Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat*. 18

1) Zakat Hewan ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, dan burung).

2) Zakat Emas dan perak

Termasuk dalam pengertian emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada masing-masing negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, kesemuanya termasuk kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nishab dan besarnya zakat diqiyaskan dengan emas dan perak.

3) Zakat Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk jual-belian dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lainnya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikata seperti CV, PT, Koperasi, dan sebagainya.

4) Pertanian

Hasil pertanian adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

5) Zakat *ma'din* dan kekayaan laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat dalam kekayaan perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah,

marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.

6) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau bisa disebut harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya³¹.

7) Zakat Profesi atau Penghasilan

Dewasa ini, begitu banyak profesi yang dijalankan oleh umat muslim, mulai dari pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, guru, wartawan, dosen, konsultan, notaris, pengacara, dan lain-lain. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi bisaanya disebut dengan *al-mal mustafad*³².

4. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq al-zakah*) sebagaimana apa yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat at-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

³¹Gustian Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat*, 20

³²Fakhruddin, *fiqh dan menejemen zakat*, 133

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60).

Delapan golongan berawal dari sabda oleh Rasulullah dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri: bahwa suatu hari disaat Rasulullah membagi sedekah, datanglah kesitu seorang lelaki bernama Dzulhuwasirah Harqush At-Tamimy, dan berkata: Ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya, Rasul-pun berkata “jika saya tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Dikala itu berkata Umar: ya Rasulullah, izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi dengan katanya: jangan, biarkan orang ini! Maka disaat itu turulah ayat 59 dan 60 Surat at-Taubah.

Dengan demikian jelaslah delapan golongan tersebut adalah:

a. Fakir

adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, kecuali baju yang melekat di tubuhnya atau sekedar barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

b. Miskin

adalah orang-orang yang memiliki harta, namun sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya³³.

c. Amil

³³Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 11

adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan zakat, mulai dari para pengumpul sampai bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai para penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahiqnya.³⁴

d. Muallaf

adalah orang-orang yang baru memeluk agama islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru.

e. Hamba saya

adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.

f. Gharimin

adalah mereka yang mempunyai hutang tak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir.³⁵

g. Fisabilillah

adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah, dan lain-lain.

h. Ibnu sabil

adalah orang-orang yang berpergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal³⁶.

³⁴ Yusuf qardhawi, *Hukum Zakat*, 545

³⁵ Hasbi Ash Siddieqy, *Pedoman Zakat Cet III* (Semarang Pustaka Rezki Putra, 1999), 185

³⁶ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 11

5. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara *syara'*.³⁷ Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Merdeka
Seorang budak tidak dikenai membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- b. Islam
Seorang muslim tidak wajib membayar zakat
- c. Baligh dan berakal
Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada harta-hartanya, karena keduanya bukan ternasuk *mukallaf*.
- d. Harta tersebut memang hra yang wajib dizakati, sebagaimana yang telah di paparkan peneliti di muka.
- e. Harta tersebut telah mencapai *nishab*.
- f. Harta tersebut adalah milik penuh.
- g. Telah berlalu satu tahun (*haul*)
- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar dan pokok.
- j. Harta tersebut harus didapatkan dari cara yang baik dan halal.
- k. Berkembang.

³⁷ Fakhruddin, *Fiqh Dan Menejemen Zakat*, 33

6. Faidah Zakat

Setidaknya ada tiga aspek faidah zakat, yaitu faidah secara *dinniyah*, *khuluqiyyah*, *ijtima'iyah*.

a. Faidah *Dinniyah*

- 1) dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akherat.
- 2) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub kepada Tuhannya, akan menambah ketaatan karena memuat beberapa ketaatan.
- 3) Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan Allah dalam Q.S Al-Baqarah: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: "Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Q.S. Al-Baqarah: 276).

- 4) Zakat merupakan sarana penghapusan dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah.³⁸

b. Faidah *khuluqiyyah*

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia membutuhkan saling membantu, toleransi antar sesama dan berlapang dada. Karena itulah melalui zakat maka, akan menumbuhkan sifat saling membantu, toleransi, yang pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa

³⁸Fakhruddin, *Fiqh dan Menejemen Zakat*, 31

membayarkan zakat akan selalu berlapang dada. Bersikap saling asah, saling asuh, dan berbelas asih kepada sesama.

Dapat dirinci faidah zakat secara *khuluqiyah* adalah;

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- 2) Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* dan lembut kepada saudara yang tidak punya.
- 3) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang berfaidah baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- 4) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

c. Faidah *ijtima'iyah*

- 1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- 2) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidfi sabilillah*.
- 3) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah

akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.

- 4) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil faidah.

C. Amil Zakat

Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah *subhanahu wataala*.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. At Taubah, 103).

Sayid Sabiq mengatakan,

“Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat,

*penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat.*³⁹

‘Adil bin Yusuf al ‘Azazi berkata,

*“Yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat. Demikian pula termasuk amil adalah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.”*⁴⁰

Syeikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin mengatakan, “Golongan ketiga yang berhak mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya. Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan penuh amanah dan kesungguhan maka mereka turut mendapatkan pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya yang lain bukan dari zakat.”

³⁹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 327

⁴⁰Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Tamamul Minnah fi Fiqh al Kitab Wa Shahih al Sunnah*, Juz II (Mesir: Muassasah Qurthubah), 290

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa syarat agar bisa disebut sebagai amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena yang disebut amil adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu.

Memiliki otoritas untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah sebuah keniscayaan bagi amil karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ringkasnya, syarat disebut amil zakat itu ada dua:

1. Diberi kuasa oleh penguasa untuk mengurus zakat, bukan mengangkat dirinya sendiri sebagai amil zakat.
2. Mengambil dan mendistribusikan zakat sehingga ia bukan hanya duduk di masjid atau di kantornya.

Lebih lanjut, zakat adalah ibadah yang berkenaan langsung berupa harta benda dan material, maka Allah melimpahkan wewenangnya untuk menerimanya kepada pihak yang ditunjuknya, yaitu para khalifah (pemerintah), dalam hal ini dilaksanakan oleh badan badan amil zakat, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadist Nabi SAW:

ادفعوا صدقا تكم الى من ولاه الله لكم (رواه ابن عمر)

Artinya: "Serahkanlah sedekah (zakat) kamu kepada orang yang oleh Allah ditugaskan mengurus urusan kamu (pemerintah)". (H.R. Ibnu Umar).⁴¹

⁴¹Dr. Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam dimensi mahdhah dan sosial)*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2001), 196

Konsep diatas diperjelas lagi oleh beberapa mufassir dan fuqaha antara lain al-Isah, tidaklah memadai jika pemilik harta (muzaki) menyerahkan langsung zakatnya kepada para mustahik (penerima zakat), ini juga dipertegas oleh imam al-jashshah dalam tafsirnya Ahkam Al-Qur'an, bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah.

Dari kalangan fuqaha, antara lain Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Al-Qardhawi, memandang mutlak zakat ditangani dan dipungut oleh pemerintah, karena pemerintah lebih tahu tentang siapa orang-orang yang benar-benar tergolong *ashnaf* delapan, dan pemerintah juga lebih bertanggung jawab untuk mengurus mereka.

Pengurus zakat melalui pemerintah akan diperoleh beberapa keuntungan baik secara material, yaitu lebih efektif dan efisien, maupun secara moral, yaitu terpeliharanya harkat dan martabat serta harga diri para golongan penerima zakat.

Selanjutnya, pengelolaan zakat melalui pemerintah atau amil mempunyai beberapa manfaat:

1. Agar tak Subjektif

Zakat adalah hak orang lain. Jika sudah disisihkan, sebaiknya segera serahkan kepada lembaga amil zakat. Jika tidak secara psikologis siapapun tergoda untuk mengelola sendiri karena zakat itu berasal dari hartanya. Karena berasal dari harta sendiri seolah-olah dia masih menjadi pemilik. Dalam kondisi seperti ini, pengelola zakat menjadi amat subjektif. Sangat tergantung pada selera dan suasana hati. Jika pas dengan selera, zakat bisa dengan segera disalurkan. Sebaliknya jika tidak pas atau suasana hati gundah, zakat sulit dikeluarkan.

2. Menjaga hak Mustahik

Dalam kondisi labil, manusia cenderung bertindak emosional tak terkontrol. Zakat yang milik orang lain, akhirnya tersendat karena harus melalui tahap yang tidak lagi rasional. Bisa jadi ketidaksukaan muzaki meledak saat seorang miskin meminta-minta. Atau boleh jadi simiskin diminta untuk mengerjakan pekerjaan, sebagai imbalan untuk memperoleh zakatnya yang sesungguhnya sudah menjadi haknya.⁴²

3. Objektif Profesional

Jika zakat dikelola oleh lembaga amil, harga diri dan harkat serta ketidakberdayaan mustahik dijaga. Mereka datang untuk menuntut hak. Dan bagi lembaga amil, ini sudah tugasnya untuk melayani mereka tidak dengan *pretense* macam-macam. Tapi mustahik boleh mengajukan gugatan jika permohonannya ditolak. Mustahik juga tidak akan pernah kehilangan muka karena disepelekan apalagi terhina.

Lembaga amil berperan mengemban amanah dana muzaki untuk mustahik. Jadi para amil tertuntut untuk bekerja profesional. Tidak ada unsur subjektif karena asal usul dana bukan berasal dari amil. Jadi dalam kerjanya amil sungguh-sungguh objektif, melihat mana mustahiq yang perlu diprioritaskan untuk dibantu dan mana mustahik yang berpura-pura.

4. Dana terhimpun Besar

Dengan lembaga, dana bisa terhimpun dari berbagai sumber di masyarakat. Jika muzaki yang mengelola, sulit bagi muzaki lain untuk mempercayakan

⁴²Eri sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat, Institute Manajemen Zakat, 2004), xxxv

dananya. Ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Jika muzaki yang mengelola, tidak bisa dicegah akan muncul berbagai persepsi dan fitnah. Karena kekhawatiran itulah sulit untuk bisa menghimpun dana dari muzaki lainnya. Disamping itu juga jika muzaki yang mengelola langsung, dana zakat akan tercecer di mana-mana, atau masih tersimpan dikantung-kantung muzaki, dan bahkan tak bisa lagi dibayarkan karena berbagai kendala.

5. Pemberdayaan

Jika lembaga amil yang khusus mengelola, dana memang dapat dihimpun dalam jumlah besar. Dengan dana besar itu, berbagai program pemberdayaan dapat dikembangkan dan diimplementasikan. Sistem asuransi kesehatan bagi kalangan mustahik. Atau dapat mengembangkan rumah sakit cuma-cuma untuk kalangan fakir miskin. Membangun industri-industri dan pabrik-pabrik dengan memperkerjakan orang-orang miskin. Atau lembaga juga dapat membangun pasar untuk pengusaha-pengusaha mikro. Disamping dengan lembaga dan dana yang cukup, amil dapat membangun pendidikan yang amat murah dan juga cuma-cuma bagi kalangan fakir miskin.

D. Konsep Dasar Pola, Peran dan Fungsi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah.

1. Pola, Peran dan Fungsi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

a. Lembaga Amil Zakat⁴³

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi Lembaga Amil Zakat. Setiap Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi muzaki atau mustahik.

1) Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat

Lembaga amil zakat tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah Provinsi di Indonesia. Untuk membentuk lembaga amil zakat tingkat pusat, sesuai keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, setiap institusi pembentuk harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data muzaki dan mustahik
- c) Melah beroperasi minimal selama dua tahun
- d) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir

⁴³*Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, 11.

- e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 Provinsi
- f) Mendapat rekomendasi dari forum zakat (FOZ)
- g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam 1 tahun
- h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan badan amil zakat Nasional dan Departemen Agama

Lembaga amil zakat tingkat pusat yang sudah dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- a) Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika yang didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1996 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 439 tahun 2001, tanggal 08 Oktober 2001.
- b) Lembaga Amil Zakat Yayasan Amanah Takaful yang didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1998, dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 440 tahun 2001 tanggal 08 Oktober 2001
- c) Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat yang didirikan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1999 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 441 tahun 2001 tanggal 08 Oktober 2000

- d) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Muamalat yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 481 tahun 2001 tanggal 07 Nopember 2001.
- e) Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Fallah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 19 Juli 1995 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 523 tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001.
- f) Lembaga Amil Zakat Yayasan Baitul Maal Hidayatullah yang didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2001 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 538 tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001.
- g) Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 1999 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 406 tahun 2002 tanggal 17 September 2000
- h) Lembaga Amil Zakat PP. Muhammadiyah (LAZIS Muh) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1914 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 442 tahun 2001 tanggal 08 Oktober yang disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 457 tahun 2002 tanggal 21 Nopember 2002.

- i) Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Ummul Quro' (DSUQ) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2001 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 157 tahun 2003 tanggal 18 Maret 2003.
- j) Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid yang didirikan di Bandung pada tanggal 28 Juni 2002 dan dikukuhkan dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 410 tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004.

2) Lembaga Amil Zakat tingkat Provinsi

Lembaga amil zakat tingkat Provinsi dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di 2/3 jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi yang bersangkutan. Untuk membentuk lembaga amil zakat tingkat Provinsi, sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 setiap institusi pembentuk harus mengikuti kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data muzaki dan mustahik
- c) Telah beroperasi minimal selama dua tahun
- d) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir
- e) Memiliki wilayah operasi secara Nasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi tempat lembaga berada

- f) Mendapat rekomendasi dari kantor wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.
- g) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dalam 1 tahun
- h) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan bersedia diaudit oleh akuntan publik
- i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan badan amil zakat daerah dan kantor wilayah Departemen Agama Provinsi setempat.

Lembaga amil zakat tingkat Provinsi yang sudah dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah:

- a) Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid di Bandung Jawa barat
- b) Lembaga Amil Zakat Manuntung Peduli di Balikpapan Kalimantan Timur
- c) Lembaga Amil Zakat Peduli Ummat Waspada di Medan Sumatera Utara
- d) Lembaga Amil Zakat Aceh Peduli di Banda Aceh, Nagroe Aceh Darussalam.

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang lahir karena tuntutan Islam. Dalam prakteknya lembaga zakat harus memenuhi koridor syariah. Berbagai program boleh dikemas sesuai dengan kemampuan ijtihadi. Asal tak

lepas dan menyimpang dari prinsip syariah. Oleh Karena itu dalam lembaga zakat, pengawasan dibedakan atas dua substansi, yakni:

(1) Secara Fungsional

Pengawasan telah built-in melekat inheren dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap amil. Pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral, fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung amil dipaksa dewasa, matang dan sangat bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakan dengan lembaga sosial umum lainnya.

.....تَعَدُّوْا أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوْا فَلَا.....^ط ج

Artinya: "...janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran..." (Q.S. An-Nisa: 135).⁴⁴

(2) Secara Formal

Lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktural. Bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat badan pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syariah berada diatas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syariah, melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah. Mengingat namanya adalah Dewan Syariah, maka Dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya. Dipimpin oleh Ketua

⁴⁴(Q.S. An-Nisa(4) : 135

Dewan Syariah, yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Syariah.⁴⁵

b. Pola Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat

Dalam peraturannya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, bahwa struktur lembaga pengelola zakat dibuat berdasarkan tiga kegiatan utama lembaga zakat, yaitu:

- 1) Penghimpun
- 2) Pengelola (keuangan)
- 3) Pendayagunaan

Dua kegiatan yakni penghimpunan dan pendayagunaan, merupakan ujung tombak kembar organisasi zakat untuk terjun ke masyarakat. Sedang pengelola (keuangan) merupakan kegiatan yang bersifat *supporting*.

1) Penghimpunan

Peran fungsi dan tugas lembaga amil zakat di bidang penghimpunan, yaitu dikhususkan untuk mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat.

Dalam kegiatannya mengacu pada inti, yang pertama dananya berasal dari donatur baik perorangan maupun perusahaan. Dan yang kedua, sebagai manusia donatur mengeluarkan dana karena sentuhan tertentu.

Ada beberapa cara dalam pengumpulan zakat

a) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi Badan Amil Zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudahan bagi muzaki

⁴⁵Eri sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat, Institute Manajemen Zakat, 2004), 141

untuk membayar zakatnya, maka setiap badan amil zakat dapat membuka Unit Pengumpulan Zakat.

b) Pembukaan Kounter Penerimaan Zakat

Kounter atau loket penerimaan zakat harus dibuat yang representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan yang profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzaki yang akan membayar zakat.

c) Pembukaan Rekening Bank

Suatu kemudahan lain bagi para muzaki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzaki adalah dibukanya rekening pembayaran zakat.

Sedangkan untuk pelaksanaannya, pengumpulan zakat dilaksanakan oleh:

- (1) Badan atau Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan semua pihak pemerintah atau swasta di wilayah masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari muzaki atas persetujuan atau pemberitahuan muzaki melalui nomor rekening Badan atau Lembaga Amil Zakat.
- (2) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan pamflet yang disebarakan melalui petugas bank
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka badan atau Lembaga Amil Zakat dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencantumkan nomor rekening pembayaran dana zakat.

- (4) Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan dana zakat muzaki baik perorangan maupun badan, dapat dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau unit pengumpulan.
- (5) Badan atau Lembaga Amil Zakat menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.⁴⁶

2) Pengelolaan (Keuangan)

Ada beberapa program sebagai implementasi dari pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan, dapat dikelompokkan menjadi 4 program besar (*Grand Programe*), yaitu Program Sosial, Program Pendidikan, Program Ekonomi dan Program Dakwah.

a) Program Ekonomi

Program-program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat. Lembaga Amil Zakat memiliki program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mencakup antara lain:

- (1) Pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal. Program ini dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat petani dan perajin dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Takaful.

⁴⁶*Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003, 64.

- (3) Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha. Program ini menjadi unggulan dari Lembaga Amil Zakat Dompot sosial Ummul Quro'
- (4) Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir merupakan salah satu program unggulan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid.

b) Program Sosial⁴⁷

Program ini berupa:

- (1) Penyelamatan Kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak. Program ini merupakan program unggulan dari Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat.
- (2) Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus, merupakan salah satu program dari pada Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Ummul Quro'.
- (3) Penciptaan Santri Lingkungan Hidup merupakan salah satu program unggulan Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid.

c) Program Pendidikan

Pendidikan adalah jalan untuk menggapai hari esok yang lebih baik.

Mengingat kemampuan pemerintah yang belum dapat menyediakan kesempatan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh warga Negara, maka peran

⁴⁷*Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, 23.

serta masyarakat sangat diharapkan dalam penyediaan sarana pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Program untuk pendidikan ini berupa:

- (1) Mengembangkan potensi mustahiq dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia umat.
- (2) Menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi.
- (3) Mengelola perpustakaan dan menyalurkan buku agama.
- (4) Pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna.

d) Program Dakwah

Program dakwah bisa berupa:

- (1) Bantuan sembako kepada para muallaf
- (2) Pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah
- (3) Pelatihan dan kursus bagi para da'i dan *muballigh*
- (4) Pengiriman da'i-da'i ke daerah-daerah terpencil

c. Badan Amil Zakat

Badan Amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.⁴⁸

⁴⁸*Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, 8.

Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan.

Badan Amil Zakat Susunan pengurusnya terdiri dari ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah.

1) Badan Amil Zakat Nasional

Pembentukan badan Amil zakat Nasional disahkan dengan keputusan Presiden Republic Indonesia yang susunan pengurusnya diusulkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan berkedudukan di Ibukota Negara.

Susunan organisasi atau pengurus Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Badan Amil Zakat Daerah Provinsidibentuk dengan Keputusan Gubernur yang susunan pengurusnya diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Susunan organisasi atau pengurus Badan Amil Zakat Daerah Provinsi terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

3) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota

Badan Amil zakat Daerah Kabupaten atau Kota dibentuk dengan keputusan Bupati atau Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

4) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

d. Pola Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat

1) Pengumpulan

Dalam hal ini Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

a) Badan Amil Zakat Nasional

Melakukan Pengumpulan Zakat yang ada di:

- (1) Instansi pemerintah tingkat pusat (Departemen dan Non Departemen).
- (2) Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kantor pusat Jakarta.
- (4) Perusahaan swasta Nasional dan perusahaan asing milik orang Islam berskala Nasional yang beroperasi di Jakarta.

b) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Melakukan Pengumpulan Zakat yang ada di:

- (1) Instansi pemerintah Daerah atau dinas Daerah Provinsi.
- (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cabang Provinsi dan

Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Perusahaan swasta dan perusahaan milik orang Islam
di Daerah setempat.

(4) Perorangan

c) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota.

Melakukan Pengumpulan Zakat yang ada di:

(1) Instansi Pemerintah Daerah atau Dinas Daerah Kabupaten atau Kota.

(2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cabang Kabupaten atau Kota dan
Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Perusahaan swasta dan perusahaan milik orang Islam
di Daerah setempat.

(4) Perorangan

d) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Melakukan Pengumpulan Zakat yang ada di:

(1) Instansi Pemerintah Daerah atau Dinas Daerah Kecamatan.

(2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cabang Kecamatan dan Badan
Usaha Milik Daerah.

(3) Perusahaan swasta dan perusahaan milik orang Islam
di Daerah setempat.

(4) Perorangan

2) Pendistribusian⁴⁹

⁴⁹*Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, 23.

Setiap Badan Amil Zakat setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada 3 sifat:

- a) Bersifat hibah, pemberian dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di wilayah masing-masing.
- b) Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- c) Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir, untuk member kesempatan penerima lain yang lebih banyak.

3) Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat dapat diperuntukkan kebutuhan konsumtif dan produktif:

a) Kebutuhan Konsumtif

Zakat diperuntukkan untuk pemenuhan hajat hidup para mustahik dengan delapan *ashnaf*. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- (1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan *ashnaf* khususnya fakir miskin

(2) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

(3) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

b) Kebutuhan Produktif

Pendayagunaan zakat khususnya yang berupa infaq dan shadaqah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

(1) Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq delapan *ashnaf* sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.

(2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.

(2) Mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.

E. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Dalam hal ini penulis mendiskripsikan perbedaan yang muncul antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga bisa penulis cermati letak indikasi potensi disfungsi tersebut, beberapa perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang baru disahkan antara lain:

1. Pada Undang-Undang lama, namanya adalah Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, sementara Undang-Undang Zakat baru namanya adalah Undang-Undang Zakat, Infak dan Sedekah.

2. Pada Undang-Undang lama, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat, sementara dalam Undang-Undang zakat baru posisi pemerintah dan atau badan zakat pemerintah Badan Amil Zakat Nasional lebih tinggi.
3. Pada Undang-Undang lama, masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat, pada Undang-Undang baru, hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.
4. Pada Undang-Undang lama, pengaturan Lembaga Amil Zakat hanya dalam dua pasal, sementara pada Undang-Undang baru, Lembaga Amil Zakat diatur dalam 13 pasal. Pada Undang-Undang lama, Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh masyarakat, sementara pada Undang-Undang baru, Lembaga Amil Zakat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam.
5. Pada Undang-Undang lama, aturan lanjutan Undang-Undang semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri, sementara pada Undang-Undang baru, sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah.

Selain terdapat perbedaan mendasar antara Undang-Undang zakat yang baru dan yang lama, Undang-Undang zakat yang baru juga mendapat kritik keras dari banyak Lembaga Amil Zakat dan sebagian masyarakat. Kritik tersebut ditujukan kepada tiga masalah krusial yang ada di dalamnya, yaitu :

1. Syarat izin pendirian Lembaga Amil Zakat adalah harus didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Padahal pada kenyataannya saat ini banyak Lembaga Amil Zakat yang telah berdiri dan beroperasi namun tidak didirikan oleh Organisasi Masyarakat Islam.
2. Tidak diatur dan dijelaskannya kedudukan dan posisi Lembaga Amil Zakat daerah, baik Lembaga Amil Zakat propinsi maupun Lembaga Amil Zakat kabupaten atau kota.

3. Tidak diperkenankannya kelompok masyarakat atau organisasi untuk mengelola zakat, apabila kelompok masyarakat atau organisasi tersebut tidak memiliki izin sebagai Lembaga Amil Zakat.
4. Meskipun telah ada penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional bahwa ketiga hal di atas akan diakomodasi dan diserap dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama, akan tetapi sebagian Lembaga Amil Zakat dan masyarakat masih tetap khawatir. Sebagian Lembaga Amil Zakat dan masyarakat khawatir bahwa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama yang nanti dibuat justru akan memperkuat muatan tersurat yang ada pada Undang-undang zakat yang baru tersebut.
5. Menyadari bahwa masih banyaknya celah berbahaya, yang dikandung oleh Undang-Undang zakat baru ini, maka menjadi tugas setiap praktisi dan pemerhati zakat untuk bersama-sama bekerja keras dalam mengawal Undang-Undang yang baru ini. Peran pengawalan ini diimplementasikan dengan ikut serta membantu menyusun atau memberi masukan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama. Setiap pihak yang terpanggil untuk mengawal Undang-Undang zakat baru ini, harus bersungguh-sungguh terlibat dalam memastikan bahwa semua isi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama dari Undang-Undang zakat baru ini, betul-betul isinya sesuai dengan apa yang kita harapkan.